



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT BINA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, email: info.ditbtpp@pu.go.id

Jakarta, 26 September 2025

Nomor : UM 0102-Cg/0642
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Bimbingan Teknik Nafas Baru di tengah Krisis (Ruang) Kota

Yth. Bapak/Ibu
(daftar terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknik oleh Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 2 Oktober 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting melalui tautan <https://bit.ly/Bimtekbttbgl>
Live Streaming Youtube [pupr_ck_btbtbgl](https://www.youtube.com/channel/UCpupr_ck_btbtbgl)
Acara : Bimbingan Teknik Nafas Baru di tengah Krisis (Ruang) Kota

Bimbingan Teknik Nafas Baru di tengah Krisis (Ruang) Kota merupakan bimbingan teknik mengenai pendekatan penanganan krisis ruang perkotaan melalui warisan budaya dan identitas lokal, sekaligus pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya.

Bagi seluruh calon peserta diharapkan untuk dapat melakukan registrasi terlebih dahulu melalui tautan <https://bit.ly/Bimtekbttbgl> pada menu "Registrasi Bimtek Nafas Baru di tengah Krisis (Ruang) Kota". Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Fahmy Luthfie Shahreza (+62-838-2105-4946).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Bina Teknik
Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan,


Ir. Dian Irawati, M.T.
NIP. 196707251996032001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya;
2. Direktur Jenderal Prasarana Strategis.

Daftar Undangan
Bimbingan Teknik Nafas Baru di tengah Krisis (Ruang) Kota

A. Narasumber

1. Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
2. Punto Wijayanto, S.T, M.T.
3. Ardzuna Sinaga, S.T.
4. Widiyani, S.T, M.T, Ph.D.

B. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU

1. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman;
2. Direktur Pengembangan Kawasan Strategis;
3. Direktur Kepatuhan Intern;
4. Kepala Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran, Direktorat Bina Penataan Bangunan;
5. Kepala Subdirektorat Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara, Direktorat Bina Penataan Bangunan;
6. Kepala Subdirektorat Kelembagaan Bangunan Gedung, Direktorat Bina Penataan Bangunan;
7. Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Bina Penataan Bangunan;
8. Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Bina Penataan Bangunan;
9. Kepala Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran, Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis;
10. Kepala Subdirektorat Kelembagaan Kawasan Strategis, Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis;
11. Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis;
12. Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis;
13. Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis;
14. Kepala Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
15. Kepala Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
16. Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
17. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Profesi, Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
18. Kepala Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
19. Kepala Balai Teknik Sains Bangunan, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
20. Kepala Balai Teknik Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
21. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Seluruh Indonesia:
 - 1) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh;
 - 2) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara;
 - 3) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Barat;

- 4) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Riau;
- 5) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jambi;
- 6) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Selatan;
- 7) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bengkulu;
- 8) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Lampung;
- 9) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Bangka Belitung;
- 10) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Riau;
- 11) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan DKI Jakarta Metropolitan;
- 12) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Barat;
- 13) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Tengah;
- 14) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Di Yogyakarta;
- 15) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Timur;
- 16) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Banten;
- 17) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Barat;
- 18) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Tengah;
- 19) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Selatan;
- 20) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Timur;
- 21) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Utara;
- 22) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bali;
- 23) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Nusa Tenggara Barat;
- 24) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Nusa Tenggara Timur;
- 25) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Utara;
- 26) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tengah;
- 27) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan;
- 28) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tenggara;
- 29) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Gorontalo;
- 30) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Barat;
- 31) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku;
- 32) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku Utara;
- 33) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Papua Barat;
- 34) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Papua.

C. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum.

1. Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya;
2. Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
3. Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya;
4. Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya;
5. Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya;
6. Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya;
7. Kepala Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya;
8. Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
9. Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
10. Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
11. Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
12. Kepala Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;

D. Perguruan Tinggi

1. Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI);
2. Institut Teknologi Bandung (ITB);
3. Institut Teknologi Nasional (ITENAS);
4. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS);
5. Universitas Trisakti (USAKTI);
6. Universitas Indonesia (UI);
7. Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR);
8. Universitas Gadjah Mada (UGM);
9. Universitas Brawijaya (UB);
10. Universitas Diponegoro (UNDIP);
11. Universitas Pasundan (UNPAS);
12. Universitas Islam Indonesia (UII);
13. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG);

E. Lembaga/Asosiasi

1. Seluruh Anggota Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI);
2. Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI).

Nomor :
Tanggal :

Rundown Acara
Bimbingan Teknik Nafas Baru di tengah Krisis (Ruang) Kota
Kamis, 2 Oktober 2025

No	Waktu	Durasi (menit)	Materi		Pelaksana	Keterangan
1	08.00 – 08.15	15	Registrasi peserta		Panitia	Panitia
2	08.15 – 08.20	5	Pembukaan acara		MC	MC.
3	08.20 – 08.25	5	Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PU		Panitia	
4	08.25 – 08.30	5	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis		Kepala Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan	
5	08.30 – 08.35	5	Sambutan Pembukaan Bimbingan Teknis		Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	
6	08.35 – 08.40	5	Pre-Test		Peserta	
6	08.40 – 09.00	20	Penyampaian Materi: <i>Nafas baru di tengah Krisis (Ruang) Kota</i>	Materi 1 : Aktivasi Lingkungan Perkotaan berbasis Warisan Budaya	Direktur Bina Penataan Bangunan	Narasumber & Moderator:
7	09.00 – 09.30	30		Materi 2 Ruang Lama : Vibes Baru	Punto Wijayanto, S.T., M.T.	
8	09.30 – 10.00	30		Materi 3 Warisan Budaya ke <i>Placemaking</i> : Menuju Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	Ardzuna Sinaga, S.T.	
8	10.00 – 10.30	30		Materi 4 <i>Placemaking</i> untuk Warisan Budaya dan Komunitas	Widiyani, S.T., M.T., Ph.D.	
9	10.30 – 11.30	60	Diskusi dan Tanya Jawab		Pemateri	Moderator
10	11.30 – 11.35	5	Post-Test		Peserta	Penutupan acara oleh MC
11	11.35 – 12.00	25	Penutupan Kegiatan Bimbingan Teknis		Kepala Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan	

Bimbingan Teknis “Nafas Baru di Tengah Krisis (Ruang) Kota”

Ruang Lama, Vibes Baru

Pendekatan Historic Urban Landscape untuk
Mengintegrasikan Pelestarian Kawasan Bersejarah

Punto **Wijayanto**
Arsitektur, FTSP Universitas Trisakti

01 Konsep Pelestarian Kota Pusaka

02 Pendekatan HUL dalam Pelestarian Kawasan Pusaka Terpadu

**03 Permasalahan dan Tantangan Kawasan
Pusaka, termasuk Pengelolaannya**

04 Langkah-langkah



- Kota Pusaka adalah kota atau kabupaten yang mempunyai aset pusaka yang istimewa berupa rajutan pusaka alam dan pusaka budaya yang lestari yang mencakup unsur ragawi (artefak, bangunan, dan kawasan dengan ruang terbukanya) dan unsur kehidupan fisik, ekonomi, dan sosial-budaya.
- Aset-aset pusaka sering kurang dikenali dan diakui sebagai aset penting dalam pembangunan dan sering ditempatkan pada posisi yang berseberangan dengan perkembangan ekonomi. Akibatnya, kota-kota pusaka terancam untuk kehilangan karakternya dan tumbuh tanpa kepribadian dan menjadi kota yang seragam.
- Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia (2013)

Perkembangan Konsep Pelestarian

Prioritas	1.0 Sector	+	2.0 Factor	+	3.0 Vector
Atribut	Berorientasi Obyek Atribut Benda		Berbasis Kawasan Atribut Benda		Berbasis Lanskap/saujana dan Nilai Penting Atribut Tak Benda
Nilai Penting	Ilmu Pengetahuan, Politik, Estetika, Sejarah, Usia		Ekonomi		Sosial, Ekologi
Pendekatan Manajemen	Preservasi (integritas dan otentisitas)		Transformasi (pelestarian dengan pemanfaatan kembali)		Menginspirasi (pelestarian dengan ko-kreasi)
Fokus Riset	Tunggal		Multidisiplin		Trans-disiplin
Fokus Pengambilan Keputusan	Pakar		Pengembang		Komunitas
Perangkat Manajemen	Pendaftaran, Zonasi (kawasan pelestarian), rencana pemugaran		Proses pengembangan berdasar pemetaan kawasan, program urban rehabilitasi (adaptive reuse)		Prinsip desain (tujuan strategis)

Contoh Perkembangan Pelestarian

Time Line

1527	Kotatua Jakarta
1971	Pelestarian Bermula
1974	Pembukaan Museum Sejarah Jakarta oleh Gubernur Ali Sadikin
1993	Penetapan Cagar Budaya
2007	Program Revitalisasi Taman Fatahillah (2007-2009)
2011	Pembentuk UP Kawasan Kotatua
2013	Revitalisasi Museum Sejarah Jakarta
2014	Rencana Induk Kawasan Kotatua
2015	UNESCO Tentative List dan Penetapan Kawasan Kotatua Jakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya
2017	Renovasi Kali Besar
2021	Low Emission Zone
2027	5 Abad Jakarta



1970-an



2000-an



2020-an



Lapisan Kota Layers of the City

Lanskap kota bersejarah adalah hasil dari pelapisan dan terjalannya nilai-nilai budaya dan alam dari waktu ke waktu. Melampaui konsep 'pusat bersejarah', ini mencakup konteks perkotaan yang luas dan pengaturan geografisnya.

The historic urban landscape is the result of the layering and intertwining of cultural and natural values over time. Beyond the notion of 'historic centre', it includes the broader urban context and its geographical setting

- **Historic Urban Landscape** mencakup topografi, geomorfologi, hidrologi dan fitur alam, lingkungan yang dibangun, baik bersejarah maupun kontemporer, infrastruktur di atas dan di bawah tanah, ruang terbuka dan taman, pola penggunaan lahan dan organisasi tata ruang, persepsi dan hubungan visual, serta elemen struktur perkotaan lainnya.
- Konteks tsb juga mencakup praktik dan nilai-nilai sosial dan budaya, proses ekonomi, dan dimensi warisan tak berwujud yang terkait dengan keragaman dan identitas.



Kegiatan Kebudayaan
Culture Practices

Hidrologi
Hydrology

Keragaman & Identitas
Diversity & Identity

Lingkungan Binaan
Built Environment

Topografi
Topography

Infrastruktur
Infrastructure

Geomorfologi
Geomorphology

Struktur Kota
Urban Structure

Bagaimana kota dapat menjadi ekosistem yang stabil?
How can a city become a stable ecosystem?

Bagaimana generasi mendatang terlibat dalam menjaga kelangsungan hidup perkotaan?
How can future generations be engaged in maintaining the continuation of urban life?

Bagaimana aksi dan perencanaan bekerja sama untuk mencapai kota berketahanan iklim?
How can action and planning work together in order to achieve climate-resilience for cities?

Nilai Sosial
Social Values

Ruang Terbuka
Open Space

Proses Ekonomi
Economic Processes

Bagaimana pelestarian kota dapat mendorong bentuk produktivitas baru dan pembangunan sosial-ekonomi?
How can urban conservation promote new forms of productivity and socioeconomic development?

Dapatkah pelestarian perkotaan melayani kebutuhan masyarakat setempat, termasuk masyarakat miskin dan terpinggirkan?
Can urban conservation serve the needs of local communities, including the poor and marginalized?

Bisakah kita mempertahankan dan meningkatkan identitas kota sebagai cara untuk memberi identitas?
Can we sustain and enhance the identity of cities as a way to brand them?

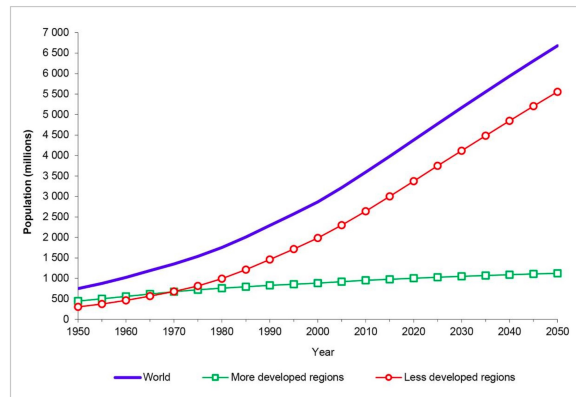
Bagaimana pelestarian kota dapat mendorong bentuk produktivitas baru dan pembangunan sosial-ekonomi?
How can urban conservation promote new forms of productivity and socioeconomic development?

Urbanisasi yang Belum Pernah Terjadi sebelumnya yang Berdampak pada Sumber Daya Budaya

Antara 1950 dan 2018, populasi perkotaan dunia tumbuh lebih dari empat kali lipat.

Akibat urbanisasi yang cepat ini, pada tahun 2007, untuk pertama kalinya, karakter penduduk dunia menjadi lebih perkotaan daripada pedesaan.

World Urbanization Prospects: The 2018 Revision
(UN 2018, p.9)



Kita Kemarin: Linimasa Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

1988-2000

- 1988 Terbentuknya IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change), badan Penasekutan Bangsa-Bangsa yang bertugas menilai ilmu pengetahuan terkait perubahan iklim. Menyebutnya, peningkatan konsentrasi CO₂ akibat aktivitas manusia menjadi penyebab utama naiknya suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20.
- 1992 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC).
- 1994 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change.
- 1995 COP (Conference of Parties) diwawancarakan pertama kali di Jerman sebagai pertemuan tahunan global untuk membahas ancaman krisis iklim.
- 1997 The Kyoto Protocol ditandatangani dalam COP 3 di Kyoto, Jepang dengan mandat bagi negara-negara peserta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

2000-2010

- 2004 Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 menegaskan sikap Indonesia yang tunduk menandatangani Kyoto Protocol.
- 2005 Konsep Net Zero diperkenalkan, dengan definisi "The notion of a *Net carbon budget*, implying net zero emissions of carbon dioxide are necessary to halt global warming".
- 2006 Kota Jakarta bergabung dalam C40 Cities, organisasi koalisi bergengsi dalam C40 Cities, organisasi koalisi seluruh dunia yang peduli dengan krisis iklim.
- 2007 COP 13 diselenggarakan di Bali, membahas reduksi emisi gas rumah kaca dan empat isu penting perubahan iklim: mitigasi, pendanaan, adaptasi, dan alih teknologi.
- 2009 Green Building Council Indonesia (GBCI) didirikan, yang berkomitmen memberikan edukasi kepada publik dalam pemertan praktik lingkungan terbaik dan memfasilitas transformasi berkelanjutan di industri bangunan.

2011-2024

- 2011 Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011.
- 2012 Pertemuan Menteri PU No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPN) 2012-2020 Kementerian PU diadukan, mengesahkan Komitmen Kementerian PUPR dalam pengendalian perubahan iklim di bidang pekerjaan umum melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- 2012 Program Pemilahan dan Palastiran Kota Pusaka (P3AP) oleh prakarsa Kementerian PUPR memperkenalkan 8 instrumen kota pusaka, termasuk terkait penanganan ketidakefisienan.
- 2015 Program Pengembangan Kota Hijau (PKH) dikembangkan Kementerian PUPR dengan 8 atribut untuk mewujudkan kota hijau.
- 2015 Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim disepakati dalam COP 21. Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen untuk mereduksi emisi sebesar 29% (skenario Fair-Representative kemampuan

sendiri) dan sebesar 41% (skenario ambisius/kecepatan mendapat dukungan internasional).

- 2015 Sustainable Development Goals (SDG) diumumkan dalam Sidang Umum PBB berupa 17 tujuan global. SDG dengan isu Air Bersih dan Sanitasi Layak di Tujuan ke-6, serta isu Air Bersih dan Sanitasi Layak di Tujuan ke-6.
- 2015 Kegiatan Pemilahan Tunggul Iklim mulai dilaksanakan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kawasan pemukiman serta meningkatkan daya tahan infrastruktur di lingkungan tersebut.
- 2016 New Urban Agenda (NUA) disepakati dalam konferensi PBB Habitat III di Ekstad, NUA mengatkan komitmen global untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan termasuk mengukuhkan bahwa setiap orang berhak untuk tinggal layak dan terjangkau serta terdapat dampak perubahan iklim.
- 2016 New Urban Agenda (NUA) disepakati dalam konferensi PBB Habitat III di Ekstad, NUA mengatkan komitmen global untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan termasuk mengukuhkan bahwa setiap orang berhak untuk tinggal layak dan terjangkau serta terdapat dampak perubahan iklim.
- 2017 Data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2017 menunjukkan dari total 62.192 desa yang ada di

Indonesia terdapat 2.400 atau 2,92% yang tergolong desa khusus perubahan iklim (Desa 4.001 atau 5,34% dalam kategori kementerian lingkungan).

- 2018 Kota Tangguh (Resilient City) diadukan dengan pemerintahan yang Jakarta dan Bandung.
- 2019 Rencana pemerintah, buktinya ke Kalimantan Presiden Joko Widodo: "BN juga menegrasikan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim, yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan pangan, dan pengurangan risiko bencana." (BN juga menegrasikan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim, yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan pangan, dan pengurangan risiko bencana.)
- 2020 Indonesia memunculkan fokus segmen adaptasi perubahan iklim di dalam RPJN 2020-2024.
- 2020 UU Cipta Karya (UU No. 11/2020) Kementerian PUPR berenergi dalam program kebijakan yang mendukung ketahanan dan pengurangan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur.

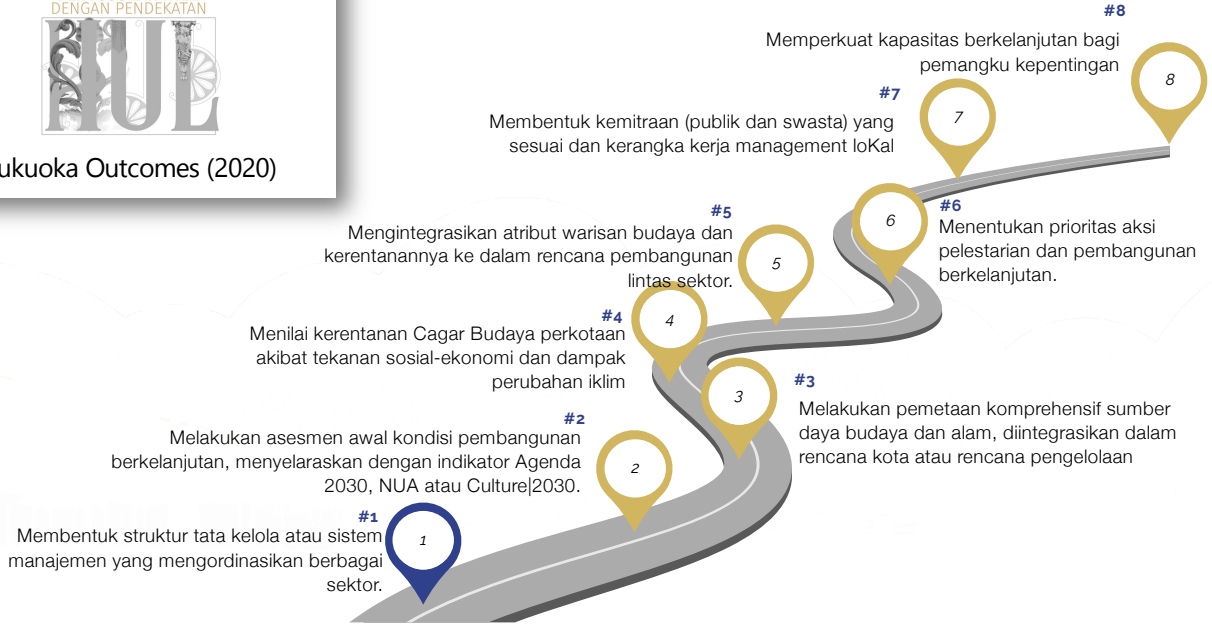
- 2021 Peraturan Menteri PUPR No. 21 tahun 2021 tentang Pemilahan Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH) ditetapkan.
- 2021 Gedung Utama Kementerian PUPR terima Penghargaan Subura Bidang Efisiensi Energi (PSBE) dengan menerapkan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH).
- 2021 Laporan PBB "The Global Forest Goals Report 2021" menyatakan bahwa hutan mempunyai peran penting dalam mengatasi krisis global perubahan iklim. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021), 2,3% luas hutan dunia berada di wilayah Indonesia.
- 2021 Laporan BWW memperkirakan setidaknya 115 juta pulau kecil Indonesia berada di ambang tenggelam.
- 2024 World Water Forum (WWF) ke-10 diwawancarakan di Bali dan menghasilkan deklarasi Orghat Menteri. Deklarasi tersebut mengemukakan komitmen untuk Indonesia dalam pengembangan air







Fukuoka Outcomes (2020)





Pelestarian perkotaan tidak cukup lagi hanya dipahami sebatas menjaga “*historic urban ensembles*” atau lanskap fisik kota bersejarah. Sebaliknya, warisan budaya perlu dilihat sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat sehari-hari, yang bisa berperan dalam pemulihan (*recovery*) dan ketahanan (*resilience*) kota di masa krisis. World Heritage City Lab, 2020

Pergeseran paradigma dari pelestarian yang semata-mata menjaga *bentuk fisik* ke arah konservasi yang berorientasi pada

1. **People-centred Recovery.** Perayaan, festival, dan warisan takbenda juga diakui sebagai elemen penting yang menunjang identitas dan kesehatan sosial masyarakat.
2. **Green Recovery.** Lingkungan alami dipandang sebagai bagian dari warisan budaya, sehingga strategi pelestarian harus memadukan alam dan budaya.
3. **Equitable Economic Recovery.** Mengarahkan pemulihan ekonomi lokal agar seimbang: mendukung pengrajin tradisional, wirausaha lokal, serta menghubungkan restorasi bangunan dengan penciptaan lapangan kerja.
4. **Recovering Space and Infrastructure.** Infrastruktur harus berbasis kebutuhan komunitas lokal, sekaligus menjaga *Outstanding Universal Value* (OUV). Pendekatan *Historic Urban Landscape* (HUL) dipakai untuk mengintegrasikan pengelolaan warisan dengan perencanaan kota dalam skala lebih luas.
5. **Digital-powered Recovery.** Teknologi digital menjadi instrumen baru: pasar daring bagi kerajinan lokal, platform tur virtual, serta penciptaan ruang publik digital.



1. People-centred Recovery

Dimensi TakBenda dalam Cagar Budaya

- Intangible Cultural Heritage atau Pusaka Budaya TakBenda
- Disertakan dalam pengelolaan pelestarian Cagar Budaya
- Mendorong keterkaitan nilai TakBenda dengan lokasi atau Cagar Budaya melalui penataan kawasan



3. Green Recovery

Pemulihan berbasis lingkungan

- Mempertahankan ruang hijau halaman
- Orientasi pengetahuan tradisional masyarakat Kotagede
- Penguatan ruang hijau kota

Sejarah Masjid Wapauwe

[illegible]

Teknik mengolah merupakan hal yang unik di wilayah ini dan menjadi petunjuk akan keanekaragaman bentuk pertanian yang majid ini. Petani juga tak meninggalkan keanekaragaman jenis tanaman-bahan-bahan pakuhan kapak pada pemrosesan hasil yang menjadi Widyawan yang berarti dari hasil. Menurut ahli peternakan perikanan dari Jepang dan Indonesia, Masao Nishiyama dan Eki Pranolo. Teknik-teknik kapak dan pakuhan ini sebenarnya dibuat sebagai dasar diuraikan pada abad ke-16-18, dan

Bahan-bahan

Bekas pohon banyu, jenis kayu lain yang digunakan dalam konstruksi Wayangreb.



(1)
The upper part of the lower roof is tied
to the tie beams with *Aleupia palm* chest palm
black fiber cords.
Alep-hagiet atau dikaitkan pada balok deng-
tal (uk. *gumetol*).

(7) The lowest part of the roof is tied also using *Aranya palm* (*batel palm*) black fiber cords in the tie beam and bamboo bindings. Atap bagian paling bawah juga dikaitkan pada balok siku siku menggunakan tali juk (*gamut*).

**TUKANG 12,
AHLI PERTUKANGAN
KAYU**

The members of the Takang 12 complemented each other and work collectively towards maintaining customary rules and rituals. Their technical knowledge is mainly used for the restoration of ceremonial and religious buildings, such as the mosque and Baldo customary hall. They lead the collective projects (*gotong royong*) carried-on by the villagers, which included Christian villages before the 1989 Mafatu conflict. These projects are carried out according to strict specifications and restrictions dictated by the Takang 12 followers and overseers alike.

Through the architectural knowledge is collectively shared, the work is done following a strict hierarchy going from the Tsukang Ila, the main coordinator and head of the Tsukang 12, down to the Tsukang Muli, who oversees communication with the Raja and the customary government. Although the 12 men complement each other, some of them, such as the Tsukang Apai, Tsukang Angkots, Tsukang Zualihang and Tsukang Muli, play more key roles. While the Tsukang Ilaur takes the first move (as put in the protective panel roof) following projects to begin, the Tsukang Apai oversees on the building and material measurements.

Pengetahuan
teknis

Kardus balok tidak sebesar seling malingkapi dan banyak bermasalah untuk mengganjal antara dua profil acak. Pengalihan balok ini ke arah lain akan digunakan untuk mengatur hubungan-bangunan antara dan bangunan seperti malingkapi dan balok (atau acak). Mereka memiliki pekerjaan yang dilakukan secara umum untuk orang-orang yang datang, yang bangunan lain dan. Kertas, sebagai contoh 1909 (3) balok. Namun, perantara ini akan digunakan untuk orang-orang yang datang.

Pengelolaan amfiteater dinilai secara kolektif namun keputusan-didekukan mengikut harkat mudi dan Takung Aia sebagai koordinator utama dan sebagai Takung 12, hingga Takung Mui yang bertanggung jawab atas komunikasi dengan Pagar dan pemertahanan adat. Mendapat 32 orang tenaga kerja saling melengkapi, dibedakan di antaranya, seperti Takung Ayud, Takung Angkita, Takung Weng dan Takung Mui, mengantikan/membantu juri kurni. Misalnya Takung Iral melakukan penilaian potensi (pemeriksaan atas panel) yang memastikan pelaksanaan dimusi, Takung Ayud menaruhkan ukuran kerdikan.

limu
ritual

The Takung (or *tsung*) not only regulate all forms of building projects, but they also supervise rituals and ceremonies, including Islamic ones, in coordination with the customary administration. During holidays for example, to avoid going to court, the Takung Etsu serves as the main centre of control. In addition, all the members of the institution (clans) such as Don Angkhot and two members of the Kajang's government (*risa* Etsu and Lopeit, in the Kajang's house, as well as in the mosque, Takung Etsu is seated to the right of the Paga and arbitrates the trials). During the procession through the village, leading to the slaughter of the goat, no adults need to be taken into account. The Takung Etsu is the centre of ceremony and the actual processes of arbitration are also the prerogatives of the Takung 12, more specifically of one Takung, named after this day: the "Takung Dzung".

Offerings to the ancestors consisting of cooked banana, satay-meat, coconut flesh and tobacco set on a raft made of palm-leaf fronds mediated after the Paga's remarks. The raft is pushed to the sea towards Sumera, where the ancestors are believed to originate.

bagi 12 jiwa yang tinggal mengantar semua benda yang akan dibawa ke rumah. Setelah selesai, mereka berangkat menuju juga mengantar hasil dari rumah, termasuk apa yang akan dibawa semua dengan sendiri atau juga. Pada kedua situasi, juga pergi pada waktu yang sama, dan juga di rumah juga. Setelah selesai, mereka berangkat menuju juga mengantar hasil dari rumah, termasuk apa yang akan dibawa semua dengan sendiri atau juga. Pada kedua situasi, juga pergi pada waktu yang sama, dan juga di rumah juga.

(1) *The Kaitetu ceremonial hall roof extension and offering*
Pemogoran atap Balai Kaitetu dengan sesajen untuk p



3. Equitable Economic Recovery

Pemulihan berbasis budaya

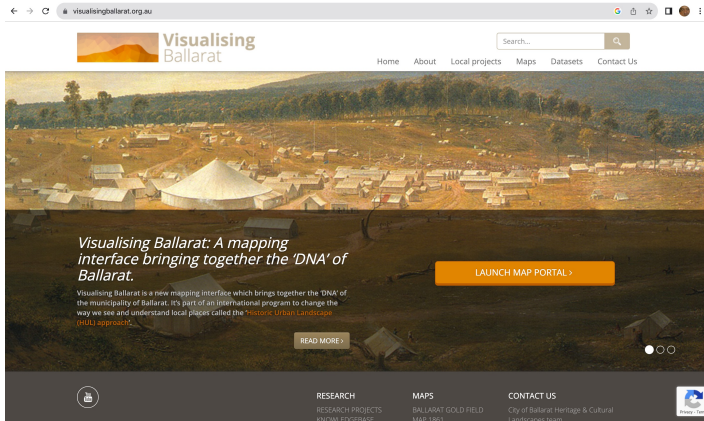
- Pemulihan berbasis pengetahuan tradisional
- Akses inklusif dan lintas komunitas
- Pelestarian Masjid Wapauwe sebagai infrastruktur sosial untuk perdamaian dan pembangunan





4. Recovering Space and Infrastructure Jembatan Memori Kota dan Kebutuhan Kontemporer

- Adaptive reuse
- Infrastruktur lama dipertahankan dengan karakter asli, sekaligus diperkuat
- M Bloc Space menjadi ruang bersama atau placemaking



5. Digital-powered Recovery

Instrumen Teknologi Digital

- Teknologi Digital menjadi instrumen baru
- Digitalisasi dipakai untuk riset, dokumentasi, dan inventaris

Cagar Budaya Perkotaan Perlu Dikelola Secara Berkelanjutan Karena...

“Pada tahun 2050, populasi perkotaan dunia diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat, menjadikan urbanisasi sebagai salah satu tren paling transformatif di abad kedua puluh satu.

Populasi, aktivitas ekonomi, interaksi sosial dan budaya, serta dampak lingkungan dan kemanusiaan, semakin terkonsentrasi di kota-kota, dan ini menimbulkan tantangan keberlanjutan yang sangat besar....”

New Urban Agenda (UN Habitat III, 2016, p. 3)



Rumah 'Landhuis' Cilincing Dihuni Banyak Kepala Keluarga

Potensi dan Tantangan Pengelolaan Kawasan Pusaka

“Di era globalisasi, kota-kota semakin bersaing satu sama lain, baik secara nasional maupun internasional.

Globalisasi membuat kota-kota serupa..., sementara budaya dan Cagar Budaya adalah sumber daya yang akan selalu membedakan mereka satu sama lain.”

The Historic Urban Landscape Guidebook
(UNESCO 2016, p. 6)



M Bloc Space: Pengembangan Bangunan Cagar Budaya dengan Adaptasi



KNOWLEDGE &
PLANNING TOOLS



COMMUNITY
ENGAGEMENT
TOOLS



REGULATORY
SYSTEMS



FINANCIAL
TOOLS

Elaborasi lebih lanjut...

Partisipasi
Multi-
Stakeholder

Pemetaan
Tematik &
Diagnostik
Awal

Identifikasi
Nilai Penting &
Potensi
Placemaking

Perencanaan
Infrastruktur
yang berbasis
Penciptaan
Tempat

Strategi
Adaptif &
Reuse

Implementasi
&
Taktis
Placemaking

TERIMA KASIH